

# NEGARA, PASAR, DAN RAKYAT

Membaca Ulang Ekonomi Politik Indonesia Kontemporer

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



## NEGARA

Kebijakan • Regulasi • Anggaran  
Pelayanan Publik



## PASAR

Investasi • Persaingan • Inovasi  
Perdagangan • Teknologi



## RAKYAT

Tenaga Kerja • Konsumen • Warga  
Produsen • Pemilik Kearifan Lokal

### ISU KUNCI

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <br>1. Pertumbuhan Ekonomi   | <br>2. Produktivitas           |
| <br>3. APBN & BUMN           | <br>4. UMKM                    |
| <br>5. Tenaga Kerja          | <br>6. Ketimpangan             |
| <br>7. Korupsi & Tata Kelola | <br>8. Digitalisasi & AI       |
| <br>9. SDA & Hilirisasi      | <br>10. Desentralisasi Wilayah |



### TEGANGAN UTAMA

|                          |    |                     |
|--------------------------|----|---------------------|
| <br>1. Stabilitas        | VS | <br>Transformasi    |
| <br>2. Efisiensi         | VS | <br>Keadilan        |
| <br>3. Intervensi Negara | VS | <br>Kompetisi Pasar |
| <br>4. Pertumbuhan       | VS | <br>Pemerataan      |
| <br>5. Eksploitasi SDA   | VS | <br>Keberlanjutan   |

### PERAN Masing-masing



## NEGARA

- Regulasi yang adil & konsisten
- Penyediaan barang publik (pendidikan, kesehatan, keamanan)
- Perlindungan sosial bagi yang rentan
- Pembangunan infrastruktur berkualitas & merata
- Kebijakan industri & hilirisasi berdaya saing



## PASAR

- Investasi produktif
- Inovasi & adopsi teknologi
- Efisiensi & alokasi sumber daya
- Kewirausahaan & penciptaan usaha
- Penciptaan nilai & lapangan kerja



## RAKYAT

- Tenaga kerja terampil & adaptif
- Konsumsi cerdas & bertanggung jawab
- UMKM sebagai tulang punggung ekonomi
- Partisipasi publik dalam kebijakan
- Pengawasan demokratis & akuntabilitas

### AGENDA STRATEGIS

|                                                            |                                                |                                                            |                                                                     |                                                                |                                                                   |                                                                         |                                                                            |                                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <br>1. Negara Efektif birokrasi lincah, berorientasi hasil | <br>2. Pasar Sehat persaingan adil, transparan | <br>3. Rakyat Berdaya kapasitas, peluang, dan perlindungan | <br>4. Pendidikan & Kesehatan Berkualitas pondasi daya saing bangsa | <br>5. Produktivitas Nasional berorientasi inovasi & teknologi | <br>6. Tata Kelola Bersih integritas, transparansi, akuntabilitas | <br>7. Digital Inklusif AI untuk produktivitas, literasi & akses merata | <br>8. Transisi Hijau Adil energi bersih, ekonomi sirkular, adaptasi iklim | <br>9. Desentralisasi Produktif konektivitas, pusat pertumbuhan baru | <br>10. Demokrasi Ekonomi partisipatif, inklusif, berkeadilan |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|



Berdaulat



Mandiri



Berkeadilan



Berkelanjutan



Berkepribadian Indonesia



*Rudy C Tarumingkeng: Negara, Pasar, dan Rakyat: Membaca Ulang  
Ekonomi Politik Indonesia Kontemporer*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

---

© RudyCT Academic Series

[rudyclt75@gmail.com](mailto:rudyclt75@gmail.com)

25 Juni 2026

# NEGARA, PASAR, DAN RAKYAT: MEMBACA ULANG EKONOMI POLITIK INDONESIA KONTEMPORER

---

## Abstrak

Ekonomi politik Indonesia kontemporer tidak dapat dipahami hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro, investasi, ekspor, atau belanja negara. Ia harus dibaca sebagai relasi dinamis antara **negara**, **pasar**, dan **rakyat**. Negara hadir melalui regulasi, APBN, BUMN, subsidi, perlindungan sosial, kebijakan industri, infrastruktur, tata kelola sumber daya alam, dan instrumen baru seperti sovereign wealth fund. Pasar hadir melalui investasi, perdagangan, inovasi, persaingan, harga, modal, korporasi, UMKM, platform digital, dan rantai pasok global. Rakyat hadir sebagai warga negara, pekerja, petani, nelayan, pelaku UMKM, konsumen, pembayar pajak, pemilih, komunitas adat, kelas menengah, serta kelompok rentan yang paling merasakan dampak kebijakan ekonomi.

Indonesia memasuki 2026 dengan capaian makro yang relatif kuat. BPS mencatat ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11%, lebih tinggi daripada 5,03% pada 2024; pada triwulan I 2026, ekonomi tumbuh 5,61% secara tahunan. Dari sisi sosial, BPS mencatat tingkat kemiskinan September 2025 sebesar 8,25%, Gini Ratio September 2025 sebesar 0,363,

dan Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2026 sebesar 4,68%. Namun, indikator makro yang relatif baik tidak otomatis menjawab persoalan lebih dalam: kualitas pekerjaan, produktivitas, daya beli kelas menengah, ketimpangan akses, kepastian hukum, korupsi, keberlanjutan fiskal, konsentrasi ekonomi, serta kepercayaan publik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Artikel ini berargumen bahwa ekonomi politik Indonesia kontemporer berada dalam persimpangan antara **stabilitas** dan **transformasi**. Indonesia relatif berhasil menjaga pertumbuhan sekitar 5%, tetapi masih menghadapi tantangan produktivitas dan kualitas institusi. World Bank menyebut Indonesia memasuki 2026 dengan momentum pertumbuhan kuat yang terutama didorong permintaan domestik, tetapi laporan tersebut juga menekankan pentingnya mengelola risiko dan membuka produktivitas. OECD memproyeksikan pertumbuhan riil Indonesia 4,7% pada 2026 dan 5,0% pada 2027, sambil menyoroti tekanan energi, biaya pinjaman, ketidakpastian kebijakan, dan pelemahan pasar tenaga kerja. ([Open Knowledge Repository](#))

Kesimpulan utama artikel ini adalah bahwa Indonesia membutuhkan pembacaan ekonomi politik yang tidak terjebak pada dua ekstrem: negara serba kuat versus pasar serba bebas. Negara yang terlalu dominan tanpa akuntabilitas dapat melahirkan rente, korupsi, inefisiensi, dan intervensi politik terhadap ekonomi. Pasar yang dibiarkan tanpa koreksi dapat memperbesar ketimpangan, monopoli, eksploitasi sumber daya, dan eksklusivitas sosial. Rakyat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, penerima bantuan, atau konsumen pasar; rakyat harus menjadi subjek demokrasi ekonomi. Dengan demikian, agenda Indonesia ke depan adalah membangun negara efektif, pasar kompetitif, dan rakyat berdaya.

**Kata kunci:** ekonomi politik Indonesia, negara, pasar, rakyat, pembangunan, BUMN, APBN, oligarki, tata kelola, ketimpangan, produktivitas, demokrasi ekonomi.

## **1. Pendahuluan**

Ekonomi politik Indonesia selalu bergerak dalam tegangan antara negara, pasar, dan rakyat. Sejak masa awal kemerdekaan, negara dipandang sebagai alat utama untuk membangun kedaulatan ekonomi, mengatasi warisan kolonial, dan mengarahkan pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru, negara menjadi pengendali utama pembangunan melalui perencanaan, BUMN, konglomerasi yang dekat dengan kekuasaan, stabilitas politik, dan integrasi Indonesia ke dalam ekonomi global. Setelah Reformasi 1998, pasar dan demokrasi memperoleh ruang lebih besar, tetapi tidak semua distorsi ekonomi-politik hilang. Oligarki, korupsi, ketimpangan akses, dan konsentrasi sumber daya tetap menjadi isu besar.

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia sering dipuji karena stabilitas makroekonominya. Pertumbuhan sekitar 5% dianggap menunjukkan ketahanan ekonomi. Inflasi relatif terkendali dalam banyak periode, sistem perbankan lebih kuat dibanding masa krisis 1997–1998, konsumsi domestik besar, dan demokrasi elektoral tetap berjalan. Namun, ekonomi politik tidak hanya bertanya apakah ekonomi tumbuh. Ia bertanya: **siapa yang menikmati pertumbuhan, siapa yang membayar biaya pembangunan, siapa yang menentukan arah kebijakan, dan siapa yang memiliki suara dalam proses ekonomi?**

Pertanyaan itu semakin penting dalam konteks kontemporer. Indonesia menghadapi perubahan global: fragmentasi perdagangan, proteksionisme, transisi energi, persaingan mineral kritis, AI, volatilitas suku bunga, krisis iklim, dan geopolitik rantai pasok. Di dalam negeri, Indonesia menghadapi tantangan produktivitas, kualitas pendidikan, pekerjaan informal, ketimpangan wilayah, tata kelola sumber daya alam, beban fiskal, dan transformasi digital.

Di sinilah judul artikel ini memperoleh maknanya: **Negara, Pasar, dan Rakyat**. Negara perlu hadir, tetapi tidak boleh berubah menjadi mesin rente. Pasar perlu bekerja, tetapi tidak boleh menjadi arena dominasi pemilik modal besar. Rakyat perlu dilindungi, tetapi juga harus diberdayakan sebagai pelaku ekonomi dan warga negara aktif. Membaca ulang ekonomi politik Indonesia berarti mencari keseimbangan baru antara ketiganya.

---

## **2. Negara dalam Ekonomi Politik Indonesia**

Negara Indonesia sejak awal tidak pernah menjadi negara minimalis. Konstitusi menempatkan negara sebagai pengelola cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ini memberi dasar normatif bagi peran negara dalam energi, air, tanah, sumber daya alam, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Namun, peran negara selalu memiliki dua wajah. Di satu sisi, negara diperlukan untuk menyediakan barang publik, membangun infrastruktur, mengoreksi kegagalan pasar, melindungi kelompok rentan, menjaga stabilitas, dan mengarahkan industrialisasi. Di sisi lain, negara dapat menjadi sumber masalah jika birokrasi tidak akuntabel, regulasi tidak konsisten, perizinan menjadi rente, kebijakan berubah sesuai kepentingan politik jangka pendek, dan aparat publik lebih dekat kepada elite ekonomi daripada rakyat.

Negara efektif bukan sekadar negara besar. Negara efektif adalah negara yang mampu merumuskan kebijakan, menjalankan kebijakan, mengawasi dampak, memperbaiki kesalahan, dan mempertanggungjawabkan kekuasaan kepada publik. Negara yang hanya besar tetapi tidak efektif dapat menciptakan regulasi berlebihan, biaya transaksi tinggi, proyek tidak produktif, dan kebocoran anggaran. Negara yang terlalu lemah tidak

mampu mengoreksi ketimpangan, menegakkan hukum, mengendalikan monopoli, atau melindungi lingkungan.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, negara semakin hadir melalui APBN, BUMN, subsidi, hilirisasi, sovereign wealth fund, pengendalian komoditas strategis, dan kebijakan transformasi digital. Kehadiran ini dapat menjadi sumber transformasi bila dikelola dengan tata kelola yang baik. Namun, ia juga dapat menimbulkan risiko baru bila tidak transparan.

---

### **3. Pasar: Mesin Efisiensi atau Arena Ketimpangan?**

Pasar memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia. Pasar memungkinkan investasi, perdagangan, inovasi, alokasi sumber daya, kompetisi, kewirausahaan, dan penciptaan nilai. UMKM, perusahaan swasta, korporasi nasional, investor asing, startup digital, koperasi, petani, pedagang, dan konsumen semuanya bergerak dalam ruang pasar.

Namun pasar tidak selalu adil. Pasar bekerja berdasarkan daya beli, informasi, akses modal, jaringan, teknologi, dan posisi tawar. Jika akses awal tidak setara, maka hasil pasar juga tidak setara. Pelaku usaha besar lebih mudah memperoleh kredit, mengakses pasar global, memakai konsultan, memengaruhi regulasi, dan menyerap teknologi. UMKM sering menghadapi modal mahal, logistik sulit, legalitas rumit, dan keterbatasan data. Petani kecil menghadapi harga yang ditentukan pihak lain. Pekerja informal tidak memiliki perlindungan memadai.

Karena itu, pasar yang sehat membutuhkan aturan. Persaingan harus dijaga. Monopoli dan oligopoli harus dikendalikan. Konsumen harus dilindungi. Data digital harus diatur. Pekerja harus memperoleh hak dasar. Lingkungan harus diberi nilai dalam keputusan ekonomi. Tanpa itu, pasar dapat menjadi arena dominasi.

Indonesia membutuhkan pasar yang kompetitif dan produktif, bukan pasar yang dikuasai rente. Pasar produktif mendorong inovasi, efisiensi, kualitas,

dan mobilitas sosial. Pasar rente menghasilkan keuntungan karena kedekatan dengan kekuasaan, izin, konsesi, proteksi, atau akses khusus, bukan karena produktivitas.

---

#### **4. Rakyat sebagai Subjek Ekonomi Politik**

Dalam banyak diskusi ekonomi, rakyat sering muncul sebagai angka: jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, inflasi, konsumsi rumah tangga, kelas menengah, atau penerima bantuan sosial. Namun rakyat bukan sekadar angka. Rakyat adalah subjek ekonomi politik.

Rakyat adalah pekerja yang menciptakan nilai. Rakyat adalah petani yang menghasilkan pangan. Rakyat adalah nelayan yang menopang protein nasional. Rakyat adalah pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi lokal. Rakyat adalah konsumen yang menentukan permintaan domestik. Rakyat adalah pembayar pajak yang membiayai negara. Rakyat adalah warga negara yang memilih pemimpin dan berhak mengawasi kebijakan publik.

Ekonomi politik yang sehat harus menempatkan rakyat bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek pemberdayaan. Perlindungan sosial penting, tetapi tidak cukup. Bantuan sosial dapat menahan kerentanan, tetapi pemberdayaan ekonomi membutuhkan pendidikan, kesehatan, keterampilan, akses tanah, kredit, teknologi, pasar, transportasi, dan kepastian hukum.

Jika rakyat hanya menjadi penerima program, pembangunan mudah berubah menjadi klientelisme. Jika rakyat menjadi subjek ekonomi, pembangunan menjadi demokrasi ekonomi. Perbedaan keduanya sangat besar. Klientelisme membuat rakyat bergantung pada bantuan politik; demokrasi ekonomi membuat rakyat memiliki kapasitas untuk menentukan masa depannya.

---

#### **5. Pertumbuhan Ekonomi: Stabilitas yang Perlu Dibaca Kritis**

Indonesia memiliki capaian pertumbuhan yang relatif stabil. BPS mencatat ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11%, lebih tinggi daripada 5,03% pada 2024. Pada triwulan I 2026, ekonomi tumbuh 5,61% secara tahunan; dari sisi produksi, penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh paling tinggi, sementara dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh sangat kuat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Angka ini penting karena menunjukkan ketahanan. Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap bergerak. Permintaan domestik masih menjadi bantalan. Ekspor 2025 juga kuat: BPS mencatat ekspor Januari–Desember 2025 mencapai US\$282,91 miliar, naik 6,15% dibanding 2024, sedangkan ekspor nonmigas mencapai US\$269,84 miliar, naik 7,66%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, pertumbuhan 5% harus dibaca kritis. Pertumbuhan dapat menjadi stabilitas, tetapi belum tentu transformasi. Pertumbuhan yang didorong konsumsi dan belanja pemerintah berbeda dari pertumbuhan yang didorong produktivitas, inovasi, industrialisasi, dan pekerjaan berkualitas. Pertumbuhan yang terkonsentrasi di sektor tertentu berbeda dari pertumbuhan yang memperluas kesempatan rakyat.

OECD memperingatkan bahwa pertumbuhan Indonesia diproyeksikan 4,7% pada 2026 dan 5,0% pada 2027, dengan tekanan dari energi, biaya pinjaman, ketidakpastian kebijakan, dan pelemahan pasar tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak boleh membuat Indonesia terlena; fondasi produktivitas tetap harus diperkuat. ([OECD](#))

---

## **6. Produktivitas sebagai Persoalan Ekonomi Politik**

Produktivitas sering dipahami sebagai isu teknis: output per pekerja, efisiensi produksi, teknologi, dan keterampilan. Namun produktivitas juga isu ekonomi politik. Produktivitas ditentukan oleh siapa yang memiliki akses pendidikan, siapa yang mendapat kredit, siapa yang dapat memakai

teknologi, siapa yang menguasai lahan, siapa yang mendapatkan infrastruktur, dan siapa yang memiliki posisi tawar dalam rantai nilai.

World Bank menempatkan produktivitas sebagai tema penting dalam *Indonesia Economic Prospects Juni 2026: Managing Risks, Unlocking Productivity*. Laporan tersebut menyebut Indonesia memasuki 2026 dengan momentum pertumbuhan kuat yang terutama didorong permintaan domestik, tetapi tantangan berikutnya adalah membuka produktivitas agar pertumbuhan lebih berkelanjutan. ([World Bank](#))

Produktivitas Indonesia tidak akan naik hanya dengan proyek besar. Ia memerlukan reformasi pendidikan, kesehatan, vokasi, logistik, teknologi, regulasi, kualitas birokrasi, dan kompetisi pasar. Produktivitas juga memerlukan keadilan akses. Jika hanya perusahaan besar yang memperoleh teknologi, maka produktivitas nasional akan timpang. Jika UMKM, petani, nelayan, pekerja informal, dan daerah tertinggal tidak memperoleh dukungan, maka produktivitas agregat sulit melonjak.

Maka, pertanyaan produktivitas adalah pertanyaan distribusi kemampuan: bagaimana negara dan pasar memperluas kemampuan rakyat untuk menghasilkan nilai lebih tinggi?

---

## **7. Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kelas Menengah Rentan**

BPS mencatat persentase penduduk miskin September 2025 sebesar 8,25%, turun 0,22 poin persentase dibanding Maret 2025; jumlah penduduk miskin sebesar 23,36 juta orang. BPS juga mencatat Gini Ratio September 2025 sebesar 0,363, turun dibanding Maret 2025 dan September 2024. Data ini menunjukkan perbaikan sosial yang penting. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, angka kemiskinan dan Gini Ratio tidak cukup untuk membaca seluruh realitas sosial. Banyak rumah tangga tidak miskin secara statistik tetapi rentan jatuh miskin ketika terjadi sakit, PHK, gagal panen, kenaikan

harga pangan, biaya sekolah, utang konsumtif, atau bencana. Kelas menengah Indonesia juga menghadapi tekanan biaya hidup, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan ketidakpastian pekerjaan.

Kelas menengah rentan penting dalam ekonomi politik karena mereka adalah penopang konsumsi, pajak, pendidikan anak, dan stabilitas sosial. Jika kelas menengah melemah, konsumsi tertahan, kepercayaan publik turun, dan politik menjadi lebih mudah terpolarisasi.

Karena itu, agenda ekonomi politik Indonesia tidak boleh hanya menurunkan kemiskinan ekstrem. Ia harus memperkuat mobilitas sosial: pekerjaan layak, upah bermartabat, perlindungan sosial adaptif, pendidikan bermutu, kesehatan terjangkau, perumahan layak, dan transportasi publik. Kesejahteraan rakyat tidak cukup diukur dari keluar dari kemiskinan; ia harus diukur dari kemampuan hidup bermartabat.

---

## **8. Tenaga Kerja: Banyak yang Bekerja, Tetapi Bagaimana Kualitasnya?**

BPS mencatat pada Februari 2026 penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, naik 1,896 juta dibanding Februari 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,68%, dan rata-rata upah buruh Rp3,29 juta. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyerap 42,49 juta pekerja atau 28,78% dari total penduduk bekerja. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data ini menunjukkan bahwa Indonesia relatif mampu menyerap tenaga kerja. Namun, ekonomi politik tenaga kerja tidak berhenti pada pertanyaan "apakah orang bekerja?" Pertanyaannya adalah: apakah pekerjaan itu formal atau informal? Apakah upahnya cukup? Apakah ada jaminan sosial? Apakah pekerja memperoleh pelatihan? Apakah ada mobilitas karier? Apakah pekerja muda dapat masuk pekerjaan berkualitas?

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam kualitas pekerjaan. Banyak pekerja berada di sektor informal dan produktivitas rendah. Pertanian menyerap banyak tenaga kerja tetapi tidak selalu memberikan pendapatan

tinggi. Jasa informal menyerap banyak orang tetapi rentan. Transformasi digital dan AI dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat menekan pekerjaan administratif dan rutin.

Karena itu, politik tenaga kerja harus bergerak dari sekadar penyerapan menuju kualitas. Kebijakan industri, investasi, dan hilirisasi harus dinilai dari pekerjaan yang diciptakan: bukan hanya jumlah, tetapi keterampilan, upah, keselamatan, dan masa depan pekerja.

---

## **9. APBN: Mesin Pertumbuhan, Perlindungan, atau Politik Distribusi?**

APBN adalah instrumen utama negara untuk mengatur distribusi sumber daya. Melalui APBN, negara membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, subsidi, pertahanan, birokrasi, transfer daerah, dan program prioritas. Karena itu, APBN bukan dokumen teknis semata, melainkan dokumen politik: ia menunjukkan siapa yang diprioritaskan negara.

APBN dapat menjadi mesin pertumbuhan bila membiayai infrastruktur produktif, pendidikan, kesehatan, riset, logistik, energi, dan konektivitas. APBN dapat menjadi mesin perlindungan bila menjaga kelompok rentan dari guncangan. Namun APBN juga dapat menjadi mesin politik bila belanja diarahkan untuk popularitas jangka pendek, patronase, atau program yang tidak dievaluasi secara ketat.

Dalam ekonomi politik kontemporer, tantangan APBN adalah menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan disiplin fiskal. Jika negara terlalu hemat, pembangunan manusia dan infrastruktur bisa tertahan. Jika negara terlalu ekspansif tanpa kualitas belanja, risiko fiskal meningkat. Reuters melaporkan pada 2026 bahwa pembahasan revisi undang-undang keuangan negara terkait Danantara tidak berfokus pada perubahan batas defisit 3% PDB dan rasio utang 60% PDB, tetapi investor tetap memperhatikan disiplin fiskal dalam konteks ambisi belanja dan peran dana investasi negara. ([Reuters](#))

Kualitas APBN lebih penting daripada sekadar besarnya belanja. Belanja pendidikan harus menghasilkan pembelajaran. Belanja kesehatan harus meningkatkan layanan. Belanja infrastruktur harus menurunkan biaya ekonomi. Subsidi harus tepat sasaran. Bantuan sosial harus melindungi tanpa menciptakan ketergantungan politik. APBN harus menjadi alat nilai publik, bukan alat siklus politik.

---

## **10. BUMN dan Sovereign Wealth Fund: Negara sebagai Pelaku Pasar**

Indonesia memiliki tradisi kuat BUMN. BUMN hadir dalam energi, listrik, perbankan, telekomunikasi, transportasi, konstruksi, pupuk, pelabuhan, logistik, farmasi, dan berbagai sektor strategis. BUMN dapat menjadi alat pembangunan karena mampu masuk ke sektor yang membutuhkan investasi besar dan horizon panjang. Namun BUMN juga dapat menjadi sumber inefisiensi jika terlalu banyak penugasan, intervensi politik, utang, atau tata kelola lemah.

Dalam beberapa tahun terakhir, peran sovereign wealth fund dan badan pengelola investasi semakin menonjol. Danantara menjadi contoh penting wajah baru intervensi negara. Reuters melaporkan bahwa peran Danantara meluas dalam agenda ekonomi nasional, termasuk pengelolaan komoditas strategis dan proyek pembangunan; laporan tersebut juga menyoroti kekhawatiran mengenai kesiapan institusional, independensi politik, transparansi, dan belum adanya laporan keuangan publik pada saat laporan ditulis. ([Reuters](#))

Instrumen seperti Danantara dapat menjadi alat transformasi jika memiliki mandat jelas, profesional, transparan, dan akuntabel. Ia dapat mengoptimalkan aset negara, menarik modal, dan mendorong proyek strategis. Namun, risiko muncul bila fungsi komersial, fungsi pembangunan, fungsi pengawasan komoditas, dan fungsi politik bercampur tanpa batas jelas.

Prinsipnya: negara boleh menjadi pelaku pasar, tetapi negara harus tunduk pada akuntabilitas publik. Ketika aset negara dikelola melalui entitas investasi, publik tetap berhak mengetahui mandat, risiko, laporan keuangan, dan dampak sosialnya.

---

## **11. Oligarki, Rente, dan Korupsi**

Salah satu persoalan utama ekonomi politik Indonesia adalah relasi antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik. Oligarki bukan sekadar keberadaan orang kaya. Oligarki adalah kondisi ketika kekayaan besar dapat memengaruhi kebijakan publik, perizinan, regulasi, hukum, media, partai politik, dan distribusi sumber daya.

Rente ekonomi muncul ketika keuntungan diperoleh bukan karena produktivitas, tetapi karena akses terhadap negara: izin tambang, konsesi lahan, impor, kuota, proyek pemerintah, subsidi, proteksi, atau kedekatan politik. Rente membuat ekonomi kurang produktif karena pelaku usaha lebih sibuk mencari akses daripada berinovasi.

Korupsi menjadi indikator penting. Transparency International mencatat Indonesia memperoleh skor CPI 34/100 dan peringkat 109 dari 182 negara pada CPI 2025. Skor ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi sektor publik masih menjadi tantangan besar bagi tata kelola Indonesia.

([Transparency.org](https://www.transparency.org))

Korupsi bukan hanya masalah moral individu. Ia adalah masalah institusi dan insentif. Jika perizinan rumit, pengawasan lemah, pembiayaan politik mahal, dan hukuman tidak pasti, korupsi akan terus muncul. Korupsi merusak ekonomi politik karena ia mengalihkan sumber daya publik ke kepentingan privat, menurunkan kepercayaan, menaikkan biaya investasi, dan membuat rakyat merasa pembangunan tidak adil.

---

## **12. Sumber Daya Alam: Modal Strategis atau Kutukan?**

Indonesia kaya sumber daya alam: batu bara, nikel, tembaga, bauksit, sawit, gas, panas bumi, hutan, laut, perikanan, dan biodiversitas. Kekayaan ini dapat menjadi modal strategis untuk pembangunan. Namun sejarah banyak negara menunjukkan bahwa sumber daya alam juga dapat menjadi kutukan bila melahirkan korupsi, konflik lahan, kerusakan lingkungan, ketimpangan daerah, dan ketergantungan komoditas.

Hilirisasi adalah upaya keluar dari pola ekspor bahan mentah. Dalam prinsip, hilirisasi penting karena Indonesia perlu memperoleh nilai tambah lebih besar. Namun hilirisasi harus dijalankan dengan standar yang jelas: transfer teknologi, tenaga kerja terampil, pemasok lokal, energi bersih, lingkungan terlindungi, dan manfaat daerah. Jika tidak, hilirisasi hanya memindahkan ekstraksi ke tahap pengolahan awal tanpa menciptakan kemampuan nasional yang mendalam.

Sumber daya alam juga terkait dengan rakyat lokal. Masyarakat adat, petani, nelayan, dan penduduk daerah tambang sering menanggung biaya lingkungan dan sosial. Ekonomi politik SDA harus bertanya: siapa memiliki izin, siapa mendapat keuntungan, siapa menanggung kerusakan, dan bagaimana manfaatnya dibagi?

Negara yang efektif harus memastikan SDA menjadi investasi masa depan: pendidikan, kesehatan, riset, teknologi, energi bersih, restorasi, dan diversifikasi daerah. Jika pendapatan SDA hanya menjadi rente politik dan konsumsi jangka pendek, Indonesia akan kehilangan momentum sejarah.

---

### **13. Desentralisasi dan Ketimpangan Wilayah**

Reformasi membawa desentralisasi besar. Daerah memperoleh kewenangan lebih luas. Secara prinsip, desentralisasi mendekatkan kebijakan kepada rakyat. Daerah lebih memahami kebutuhan lokal, potensi wilayah, budaya, dan masalah lapangan. Namun, desentralisasi juga melahirkan tantangan: kapasitas daerah tidak merata, politik lokal dapat

dikuasai elite, perizinan daerah dapat menjadi sumber rente, dan koordinasi pusat-daerah sering tidak mudah.

Ketimpangan wilayah tetap menjadi persoalan. Jawa masih menjadi pusat industri, jasa, pendidikan, dan infrastruktur. Kawasan timur Indonesia memiliki potensi besar tetapi menghadapi biaya logistik, keterbatasan infrastruktur, dan akses layanan publik. Daerah kaya SDA tidak selalu memiliki layanan publik lebih baik. Daerah perkotaan lebih cepat menyerap teknologi digital dibanding pedesaan.

Membaca ulang ekonomi politik Indonesia berarti memperlakukan daerah bukan hanya sebagai lokasi proyek, tetapi sebagai subjek pembangunan. Pemerintah daerah perlu kapasitas teknokratik, data, fiskal, dan akuntabilitas. Pembangunan wilayah harus menghubungkan infrastruktur dengan produktivitas lokal: pangan, perikanan, pariwisata, energi, industri, pendidikan vokasi, dan UMKM.

---

#### **14. Digitalisasi dan AI: Arena Baru Ekonomi Politik**

Ekonomi digital dan AI akan menjadi medan baru relasi negara, pasar, dan rakyat. Indonesia memiliki peluang besar dalam digitalisasi: layanan publik, pendidikan, kesehatan, UMKM, pembayaran digital, pertanian, logistik, dan industri. Namun digitalisasi juga membawa risiko: monopoli platform, ketimpangan data, privasi, disinformasi, deepfake, dan ketergantungan teknologi asing.

OECD.AI mencatat Indonesia memiliki Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045 dan Peta Jalan AI Nasional yang menekankan tata kelola, talenta, infrastruktur, data, riset, inovasi, investasi, kasus penggunaan prioritas, serta pemantauan dan evaluasi. Reuters juga melaporkan pada Juni 2026 bahwa Indonesia sedang menyiapkan integrasi AI ke program-program pemerintah, tetapi menghadapi tantangan infrastruktur dan kekurangan tenaga ahli AI. ([OECD AI](#))

AI bukan sekadar teknologi. AI adalah ekonomi politik data. Siapa yang memiliki data? Siapa yang menguasai komputasi? Siapa yang membuat model? Siapa yang mengatur etika? Siapa yang bertanggung jawab jika AI salah? Jika AI hanya dikuasai platform besar dan negara tanpa pengawasan, rakyat dapat menjadi objek ekstraksi data. Jika AI dikelola sebagai infrastruktur publik, ia dapat memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan produktivitas UMKM.

---

## **15. Stabilitas Moneter dan Politik Nilai Tukar**

Bank sentral memegang peran penting dalam ekonomi politik karena stabilitas harga dan nilai tukar langsung memengaruhi rakyat. Inflasi menekan daya beli. Nilai tukar memengaruhi harga impor, energi, pangan, dan kepercayaan investor. Suku bunga memengaruhi kredit, cicilan, investasi, dan biaya modal.

Bank Indonesia pada 17–18 Juni 2026 menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%, Deposit Facility menjadi 4,75%, dan Lending Facility menjadi 6,50%. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat stabilitas rupiah dan menjaga inflasi dalam sasaran di tengah ketidakpastian global. ([Bank Indonesia](#))

Keputusan moneter selalu memiliki dampak distribusional. Suku bunga tinggi dapat menjaga rupiah dan inflasi, tetapi juga membuat kredit lebih mahal bagi UMKM, rumah tangga, dan investasi. Suku bunga rendah dapat mendorong pertumbuhan, tetapi berisiko menekan nilai tukar bila kepercayaan melemah. Di sinilah politik bank sentral muncul: kebijakan teknis selalu berdampak sosial.

Stabilitas moneter perlu dijaga, tetapi tidak boleh menjadi pengganti reformasi struktural. Bank sentral dapat menjaga kepercayaan, tetapi produktivitas, tata kelola, dan daya saing harus dibangun oleh kebijakan sektor riil.

## **16. Negara Kuat atau Negara Efektif?**

Dalam perdebatan publik, sering muncul gagasan bahwa Indonesia membutuhkan negara kuat. Namun, istilah “negara kuat” perlu dibedakan dari “negara efektif”. Negara kuat dapat berarti negara yang mampu memaksa, mengontrol, dan mengarahkan. Negara efektif berarti negara yang mampu mencapai tujuan publik secara akuntabel, transparan, dan sah secara demokratis.

Negara kuat tanpa akuntabilitas dapat menjadi otoritarian, rent-seeking, dan anti-kritik. Negara lemah tidak mampu menegakkan hukum, mengendalikan korupsi, atau melindungi rakyat. Yang dibutuhkan Indonesia adalah negara efektif: kuat dalam kapasitas, tetapi dibatasi oleh hukum; berani mengarahkan pembangunan, tetapi terbuka pada evaluasi; mampu mengelola pasar, tetapi tidak ditangkap elite.

Negara efektif memiliki beberapa ciri: birokrasi profesional, data berkualitas, perencanaan konsisten, penegakan hukum adil, pelayanan publik baik, fiskal sehat, transparansi, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berbasis hasil. Negara efektif juga mampu mengatakan tidak kepada kepentingan sempit yang merugikan publik.

---

## **17. Pasar Kompetitif dan Demokrasi Ekonomi**

Pasar yang dibutuhkan Indonesia bukan pasar liar, melainkan pasar kompetitif. Pasar kompetitif membuka ruang bagi pelaku baru, UMKM, koperasi, startup, petani, nelayan, dan industri lokal untuk naik kelas. Pasar yang terlalu terkonsentrasi akan menutup mobilitas ekonomi.

Demokrasi ekonomi berarti akses terhadap modal, pasar, informasi, teknologi, dan perlindungan hukum tidak hanya dikuasai elite. Demokrasi ekonomi bukan anti-pasar. Justru ia menuntut pasar yang lebih sehat: tidak

dimonopoli, tidak penuh rente, tidak diskriminatif, dan tidak merusak lingkungan.

UMKM harus menjadi pusat demokrasi ekonomi. Namun UMKM tidak bisa hanya dipuji sebagai tulang punggung ekonomi tanpa diberi akses nyata: pembiayaan, teknologi, pasar, legalitas, sertifikasi, logistik, dan perlindungan dari praktik tidak adil. Koperasi modern juga perlu diperkuat sebagai alat agregasi rakyat agar petani, nelayan, dan pelaku mikro memiliki skala ekonomi.

---

## **18. Rakyat Berdaya: Dari Bantuan ke Kapabilitas**

Konsep rakyat berdaya dapat dibaca melalui perspektif kapabilitas Amartya Sen. Kesejahteraan bukan hanya pendapatan, tetapi kemampuan manusia untuk memilih hidup yang bernilai. Rakyat berdaya berarti memiliki pendidikan, kesehatan, keterampilan, akses pasar, hak hukum, lingkungan hidup sehat, informasi, dan suara politik.

Bantuan sosial penting, terutama ketika masyarakat menghadapi guncangan. Namun, agenda jangka panjang adalah membangun kapabilitas. Anak miskin harus memperoleh pendidikan bermutu. Pekerja harus memperoleh pelatihan. Petani harus memperoleh teknologi dan pasar. Nelayan harus memperoleh perlindungan ekosistem dan rantai dingin. UMKM harus memperoleh pembiayaan dan digitalisasi. Masyarakat adat harus memperoleh pengakuan hak.

Pembangunan yang hanya memberi bantuan tanpa memperluas kapabilitas akan menghasilkan ketergantungan. Pembangunan yang memperluas kapabilitas menghasilkan warga yang mandiri, kritis, produktif, dan bermartabat.

---

## **19. Tiga Skenario Ekonomi Politik Indonesia**

### **Skenario 1: Negara Efektif, Pasar Sehat, Rakyat Berdaya**

Dalam skenario terbaik, Indonesia memperkuat tata kelola, mengurangi korupsi, memperbaiki kualitas belanja APBN, membangun produktivitas, memperkuat UMKM, memperdalam hilirisasi berkualitas, mengembangkan AI secara inklusif, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan tetap stabil, tetapi kualitasnya meningkat. Rakyat merasakan manfaat melalui pekerjaan layak, layanan publik, dan mobilitas sosial.

### **Skenario 2: Stabilitas Tanpa Transformasi**

Dalam skenario moderat, Indonesia tetap tumbuh sekitar 5%, kemiskinan turun perlahan, dan stabilitas makro terjaga. Namun produktivitas tidak melonjak, pekerjaan informal tetap besar, tata kelola membaik lambat, dan ketimpangan akses tetap terasa. Negara hadir, pasar berjalan, rakyat bertahan, tetapi transformasi tidak cukup cepat.

### **Skenario 3: Intervensi Negara dan Pasar Rente**

Dalam skenario buruk, negara semakin dominan tetapi tidak transparan, pasar dikuasai elite, kebijakan publik tidak konsisten, korupsi melemahkan kepercayaan, dan rakyat hanya menjadi penerima dampak. Pertumbuhan mungkin tetap ada, tetapi kualitasnya rendah. Ketimpangan, konflik sosial, dan ketidakpercayaan publik meningkat.

---

## **20. Agenda Strategis Indonesia**

Pertama, **membangun negara efektif dan akuntabel**. Reformasi birokrasi, data publik, transparansi anggaran, penegakan hukum, dan pengawasan independen harus diperkuat.

Kedua, **menyehatkan pasar dan mengurangi rente**. Regulasi harus mendorong kompetisi, bukan melindungi pemain dekat kekuasaan. Antimonopoli, reformasi perizinan, dan kepastian hukum sangat penting.

Ketiga, **memperkuat rakyat sebagai pelaku ekonomi**. UMKM, koperasi, petani, nelayan, pekerja informal, dan komunitas lokal harus mendapat akses modal, teknologi, pasar, pendidikan, dan perlindungan.

Keempat, **menjadikan APBN alat kapabilitas**. Belanja negara harus berfokus pada pendidikan, kesehatan, gizi, produktivitas, infrastruktur produktif, perlindungan sosial adaptif, dan riset.

Kelima, **memperdalam hilirisasi berkualitas**. Hilirisasi harus menghasilkan transfer teknologi, pekerjaan terampil, pemasok lokal, energi bersih, dan nilai tambah domestik.

Keenam, **mengelola BUMN dan SWF secara transparan**. Mandat komersial dan mandat publik harus dipisahkan jelas. Laporan keuangan, risiko, dan dampak publik harus terbuka.

Ketujuh, **memperkuat demokrasi ekonomi digital**. AI dan ekonomi digital harus memperluas akses, bukan memperkuat monopoli data. Perlindungan data pribadi dan regulasi platform menjadi penting.

Kedelapan, **membangun transisi hijau yang adil**. Energi, hutan, laut, biodiversitas, dan daerah tambang harus dikelola dalam kerangka masa depan rendah karbon.

Kesembilan, **memperkuat desentralisasi produktif**. Daerah harus diberi kapasitas, data, dan insentif untuk membangun ekonomi lokal berbasis potensi masing-masing.

Kesepuluh, **memperluas partisipasi publik**. Kebijakan ekonomi harus membuka ruang bagi akademisi, masyarakat sipil, pekerja, UMKM, daerah, dan komunitas lokal untuk ikut mengawasi.

---

## **21. Kesimpulan**

Ekonomi politik Indonesia kontemporer harus dibaca sebagai hubungan dinamis antara negara, pasar, dan rakyat. Negara diperlukan untuk mengarahkan pembangunan, menyediakan barang publik, melindungi rakyat, dan mengoreksi kegagalan pasar. Pasar diperlukan untuk inovasi, investasi, produktivitas, dan pertukaran. Rakyat adalah tujuan sekaligus pelaku pembangunan.

Masalah muncul ketika salah satu unsur mendominasi tanpa koreksi. Negara yang terlalu dominan tanpa akuntabilitas melahirkan rente dan inefisiensi. Pasar yang terlalu bebas tanpa regulasi melahirkan ketimpangan dan monopoli. Rakyat yang hanya dijadikan objek kebijakan kehilangan daya tawar dan kedaulatan.

Indonesia telah menunjukkan ketahanan ekonomi, tetapi tantangan ke depan lebih dalam daripada sekadar mempertahankan pertumbuhan 5%. Tantangannya adalah mengubah stabilitas menjadi transformasi.

Transformasi itu harus terlihat dalam produktivitas, pekerjaan berkualitas, tata kelola bersih, UMKM naik kelas, pendidikan bermutu, kesehatan kuat, hilirisasi cerdas, ekonomi digital inklusif, dan lingkungan berkelanjutan.

Membaca ulang ekonomi politik Indonesia berarti menolak dikotomi sempit antara negara dan pasar. Yang dibutuhkan adalah negara efektif, pasar sehat, dan rakyat berdaya. Inilah fondasi ekonomi politik Indonesia yang lebih adil: negara tidak menjadi alat elite, pasar tidak menjadi arena monopoli, dan rakyat tidak menjadi penonton pembangunan. Rakyat harus menjadi pusat, karena tujuan akhir ekonomi bukan sekadar pertumbuhan, melainkan kehidupan yang bermartabat.

---

## **Glossarium**

### **APBN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; instrumen fiskal utama negara untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan, subsidi, perlindungan sosial, dan program prioritas.

### **BUMN**

Badan Usaha Milik Negara; perusahaan yang dimiliki seluruhnya atau

sebagian besar oleh negara dan menjalankan fungsi komersial serta fungsi strategis publik.

### **Demokrasi Ekonomi**

Prinsip bahwa akses terhadap sumber daya ekonomi, pasar, modal, teknologi, dan kesempatan tidak boleh dikuasai segelintir elite.

### **Desentralisasi**

Pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pembangunan dan pelayanan publik.

### **Ekonomi Politik**

Kajian tentang hubungan antara kekuasaan, kebijakan, pasar, institusi, distribusi sumber daya, dan kepentingan sosial.

### **Hilirisasi**

Strategi meningkatkan nilai tambah dengan mengolah bahan mentah menjadi produk antara atau produk jadi di dalam negeri.

### **Kapabilitas**

Kemampuan nyata manusia untuk menjalani hidup yang bernilai, termasuk akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keamanan, dan partisipasi sosial.

### **Kelas Menengah Rentan**

Kelompok yang tidak miskin secara statistik, tetapi mudah turun ke kondisi rentan akibat guncangan pendapatan, harga, kesehatan, atau pekerjaan.

### **Negara Efektif**

Negara yang mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

### **Oligarki**

Kondisi ketika kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang mampu memengaruhi kebijakan publik.

### **Pasar Kompetitif**

Pasar yang memberi ruang persaingan sehat, mencegah monopoli, dan membuka peluang bagi pelaku baru.

### **Produktivitas**

Kemampuan menghasilkan output lebih banyak atau lebih berkualitas dengan input yang sama atau lebih sedikit.

### **Rente Ekonomi**

Keuntungan yang diperoleh karena akses khusus, izin, konsesi, proteksi, atau kedekatan politik, bukan karena produktivitas.

### **Sovereign Wealth Fund**

Dana atau badan investasi milik negara yang mengelola aset, investasi, atau kekayaan negara untuk tujuan tertentu.

### **Tata Kelola**

Sistem aturan, proses, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengambilan serta pelaksanaan keputusan publik.

---

### **Daftar Pustaka**

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2019). *The narrow corridor: States, societies, and the fate of liberty*. Penguin Press.

Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.  
DOI: 10.2307/1879431

Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,68 persen; rata-rata upah buruh sebesar 3,29 juta rupiah*. BPS.

Bank Indonesia. (2026). *BI-Rate naik 25 bps menjadi 5,75%*. Bank Indonesia.

Bates, R. H. (2001). *Prosperity and violence: The political economy of development*. W. W. Norton.

Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. *Journal of Law and Economics*, 3, 1–44. DOI: 10.1086/466560

Evans, P. B. (1995). *Embedded autonomy: States and industrial transformation*. Princeton University Press.

Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368. DOI: 10.1111/gove.12035

Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? *The Quarterly Journal of Economics*, 114(1), 83–116. DOI: 10.1162/003355399555954

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: 2025 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive Director for Indonesia*. IMF Country Report No. 26/10. DOI: 10.5089/9798229035576.002

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3,

Kauf 220–246. DOI: 10.1017/S1876404511200046

Khan, M. H. (2010). Political settlements and the governance of growth-enhancing institutions. *SOAS Working Paper*.

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

OECD. (2026). *Indonesia: OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1*. OECD Publishing.

Polanyi, K. (1944). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. Farrar & Rinehart.

Rodrik, D. (2007). *One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth*. Princeton University Press.

Rodrik, D. (2008). Second-best institutions. *American Economic Review*, 98(2), 100–104. DOI: 10.1257/aer.98.2.100

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). Politicians and firms. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(4), 995–1025. DOI: 10.2307/2118354

Stiglitz, J. E. (1989). Markets, market failures, and development. *American Economic Review*, 79(2), 197–203.

Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality*. W. W. Norton.

Transparency International. (2026). *Corruption Perceptions Index 2025: Indonesia*. Transparency International.

World Bank. (2026). *Indonesia Economic Prospects: Managing risks, unlocking productivity*. WorldBank.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 26 June 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#)). <https://chatgpt.com/c/6a367378-8ec0-83ec-9269-457be2689547>